

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PADANG DENGAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH (SAKD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

BRAMASTA
2007/88717

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PADANG DENGAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH (SAKD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Nama : Bramasta
NIM/BP : 88717/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 8 April 2012

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

DR. H. Efrizal Syofyan S.E, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Fefri Indra Arza S.E, M.Sc, Ak
NIP. 19720213 199903 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza S.E, M.Sc, Ak
NIP. 19720213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel
Intervening.**

Nama : Bramasta

BP/NIM : 2007/88717

Fakultas : Ekonomi

Padang, 8 April 2012

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : DR. H. Efrizal Syofyan S.E, M.Si, Ak	1. _____
2. Sekretaris : Fefri Indra Arza S.E, M.Sc, Ak	2. _____
3. Anggota : Lili Anita S.E, M.Si, Ak	3. _____
4. Anggota : Erly Mulyani S.E, M.Si, Ak	4. _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bramasta
NIM/Thn. Masuk : 88717/2007
Tempat/Tgl Lahir : Meral Karimun / 07 Oktober 1989
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Gelugur Wisma Indah II Blok I/2.
No. Hp/Telepon : 085264238238
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2012

Yang Menyatakan

Bramasta
NIM 2007/88717

ABSTRAK

Bramasta. 88717. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (3) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja perangkat daerah Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*, sebanyak 45 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi dan staf akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel endogen, kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel eksogen, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,522 > 1,9908$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_1 diterima) (2) Pengaruh signifikan positif antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,294 > 1,9908$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ (H_2 diterima),

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Padang untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan baik dan memaksimalkan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, agar informasi keuangan untuk menyusun laporan keuangan bisa disampaikan dengan cepat dan akurat sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu juga disarankan agar, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga diperhatikan. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Bapak Fefri Indra Azra, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak/Ibu kepala bagian akuntansi dan staf akuntansi SKPD di kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua beserta abang-abang dan adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Spesial untuk seseorang terkasih yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 dan Teman-teman HPMK-Padang, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Kualitas Laporan Keuangan	12
2. Pengawasan keuangan daerah	24
3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	31
B. Penelitian Relevan	40
C. Kerangka Konseptual	41
D. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi, Sampel, dan Responden	45
C. Jenis Dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48

E. Variabel Penelitian	49
F. Pengukuran Variabel	49
G. Instrumen Penelitian	50
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	52
I. Uji Coba Instrumen	53
J. Uji Asumsi Klasik	54
K. Teknik Analisis Data	55
L. Definisi Operasional	61
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Sampel dan Responden Penelitian.....	62
B. Analisis Deskriptif.....	63
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	75
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	77
E. Uji Model	79
F. Pembahasan	87
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Keterbatasan	98
C. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	46
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	50
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	51
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	54
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	62
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	63
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian	64
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	66
10. Statistik Deskriptif	67
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Keuangan Daerah ...	69
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	71
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	73
14. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	75
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil	76
16. Uji Normalitas	78
17. Uji Homogenitas	79
18. Uji Model Sub Struktur I	80
19. Koefisien Regresi Sub Struktur I.....	80
20. Uji Model Sub Struktur II.....	81
21. Uji Regresi Sub Struktur II	82
22. Uji F Statistik	83
23. Uji Koefisien determinasi.....	84
24. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	44
2. Struktur Diagram Jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	57
3. Sub struktur diagram jalur pengaruh X_2 terhadap X_1	58
4. Sub struktur diagram jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	58
5. Diagram jalur pengaruh X_2 terhadap X_1	80
6. Diagram jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	105
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test.....	111
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	117
4. Uji Asumsi Klasik	124
5. Pengujian Model dengan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	126
6. Uji F	128
7. Uji Koefisien Determinasi	129

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi menjadi UU nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah tersebut.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara republik Indonesia merupakan landasan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.

Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung

agar reformasi dibidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban keuangan daerah, juga perlu adanya pengawasan yang memadai. Dalam melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa azas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka oleh sebab itu, perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di kota padang.

Menurut Bastian (2006) Beberapa prioritas perbaikan dalam dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.

Pada hakekatnya jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Namun menjadi masalah adalah

tidak semua aparat pemerintah daerah mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah.

Menurut Halim (2006) sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai tujuan pengawasan yang memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih baik dibandingkan tata buku, sehingga dari segi pengawasan internal (oleh pihak pemerintah daerah sendiri), informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan oleh sistem akuntansi lebih akuntabel dan transparan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah bahwa Pemerintah akan menjalankan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud salah satunya meliputi pemberian pedoman yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan keuangan daerah, yang mana dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Dengan demikian, untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan yang baik di pemerintahan daerah khususnya dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, sangat perlu diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah dengan semestinya. Karena dalam sistem

akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan keuangan yang menghasilkan informasi-informasi yang diwujudkan dalam laporan keuangan. Untuk menerapkan sistem akuntansi agar dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas internal sehingga penerapan sistem akuntansi ini berjalan sesuai dengan rencana.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 Kota Padang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2007 yaitu disclaimer. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 opini audit LKPD kota Padang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyusun LKPD, lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. LKPD yang terus memburuk menggambarkan bahwa hampir belum terdapat kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (<http://padang.bpk.go.id/>).[10/10/2011]

Adapun penelitian mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan Firmansyah (2009) melakukan penelitian mengenai Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Barat. Penelitian mengenai sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) juga dilakukan oleh Fajar (2010) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bandung.

Adapun penelitian Fikri (2011) mengenai Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang.

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel kualitas penyajian laporan keuangan. Adapun beda dari

penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pengukuran variabel, dan sampel yang diambil.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Padang karena adanya masalah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang, di mana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah kota Padang yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Sebagai Variabel Intervening”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

- a. Sejauhmana kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang?
- b. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang?

- c. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang?
- d. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang ?
- e. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang melalui pengawasan keuangan daerah ?
- f. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam pengawasan keuangan daerah dan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD)?

C. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh pengawasan keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

- a. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang?
- b. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang;

- a. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.
- b. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.

F. MANFAAT PENELITIAN

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
- b. Bagi Akademik, sebagai bahan penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.

- c. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1, tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran;

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca;

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas;

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai, dan lainnya.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat

dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifikasiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbandingan (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi keuangan bermamfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti atau dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas,

padat, ringkas, dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang memiliki nilai prediksi tergantung kepada bagaimana informasi tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode berikutnya. Penyajian informasi keuangan seperti itu disebut sebagai *earning persistence*. Selain itu nilai prediktif informasi keuangan juga tergantung bagaimana informasi tersebut dapat digolongkan sesuai bisnis perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek perusahaan bersangkutan. Selanjutnya informasi keuangan tersebut tergantung pada kelengkapannya.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP Nomor 24 tahun 2005:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu

atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi

pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Menurut Bastian (2006) pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari

transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten bagi organisasi publik tersebut, antarperiode organisasi yang sama, dan bagi organisasi yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat dibandingkan adalah pemakai harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik, perubahan kebijakan, serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dari satu period ke periode lainnya dalam organisasi yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan sektor publik, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi, akan membantu pencapaian daya saing.

Apabila pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka organisasi perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Bastian (2006) karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk belajar tentang informasi yang disampaikan. Namun demikian, informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan sektor publik, tidak boleh disembunyikan dengan alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum.

Dengan demikian, Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten atau kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah

daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi, untuk membangun sistem pengelolaan keuangan daerah perlu penerapan suatu sistem akuntansi yang baik. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 menyebutkan bahwa untuk membangun sistem pertanggungjawaban, secara khusus telah diatur mengenai pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah melalui penetapan tatausaha keuangan, pembangunan sistem dan prosedur akuntansi, penentuan catatan dan laporan yang dihasilkan, serta penetapan kebijakan akuntansi yang diperlukan dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan daerah yang dihasilkan pemerintah merupakan “media” perwujudan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan juga perlu pengawasan yang memadai. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Dari paparan diatas dapat kita menilai bagaimana seharusnya laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik, apakah telah memenuhi karakteristik kualitatif atau belum. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

2. Pengawasan keuangan daerah

a. Pengertian

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka

penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2001) Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung- jawaban APBD.

b. Tujuan Pengawasan keuangan daerah

Dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 timbul kewajiban pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah. Maka, oleh sebab itu perlu adanya

suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu tahun anggaran mencakup:

- 1) Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak serta penerimaan hibah selama tahun anggaran yang bersangkutan.

- 2) Belanja daerah yaitu semua pengeluaran daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan.
- 3) Defisit belanja daerah yaitu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah.
- 4) Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat.
- 5) Surplus pendapatan daerah yaitu selisih lebih antara pendapatan dengan belanja daerah.

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah.

Menurut PP No.60 tahun 2008 bahwa inspektorat daerah sebagai unsur pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab. oleh sebab itu, perlu dilakukan:

1. Pengawasan intern atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam organisasi.
 - a) Prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan

- b) Kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengawasan intern atas kekayaan daerah
- a) SPI pengelolaan keuangan daerah
 - b) Transaksi penerimaan penyetoran, pembukuan penerimaan pendapatan daerah.
 - c) Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi dapat dijalankan semestinya dan sistem akuntansi akan dapat diterapkan dengan baik.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Ahmad (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,
- 11) Pengelolaan piutang daerah,
- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelolaan dana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
- 19) Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerimaan pendapatan daerah, semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam hal ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Setiap penerimaan harus disertai dengan bukti atas setoran yang lengkap, dan SKPD dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dari sisi pengeluaran, setiap pengeluaran harus didukung juga dengan bukti yang lengkap, jelas, dan sah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporannya dalam laporan keuangan daerah. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232, bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

”Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, dan yang dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi”.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, meliputi:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Menurut Departemen Keuangan (2002:13) Kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran

(STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan (DS) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja.
4. Bila dokumen di atas telah di verifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu copy untuk arsip unit perhitungan.
6. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode.

Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu akuntansi asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan bahwa asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan,

yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.

Oleh karena akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di Pemerintah Daerah.

b. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006) Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting berikut :

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip pereconomian. Hal ini berarti bahwa biaya untuk

menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan biaya versus manfaat (*cost versus benefit*) dalam menghasilkan suatu informasi.

c. Tahapan Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah

Pengembangan sistem akuntansi pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih lagi pengembangan sistem ini dimulai bersamaan dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, termasuk manajemen kas daerah. Oleh karena itu pengembangan sistem ini sangat erat kaitannya dengan perubahan faktor-faktor tersebut. Semua hal tersebut dapat dijalankan secara simultan.

Dalam BAKUN Departemen Keuangan (2002:15), tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah meliputi :

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi.
2. Pemilihan sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

3. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi (berikut software), pengadaan hardware dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggungjawab atas sistem akuntansi, penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan SDM yang kompeten di bidang akuntansi.
4. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan sementara sistem akuntansi keuangan yang baru mulai dijalankan. Pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus-menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi.

d. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi menjadi UU nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi

daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah tersebut.

Bastian (2006), Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten atau kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efektif, dan akuntabel. Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.

Penyusunan suatu sistem haruslah didasarkan pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sistem akuntansi disusun dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus/defisit, dan laporan perhitungan anggaran. Sistem akuntansi sektor publik memiliki karakteristik atau model yang

tentu saja berbeda dibandingkan dengan sistem akuntansi lainnya. Dengan demikian, proses pemahaman dan penerapan sistem ini haruslah dilakukan dengan pendekatan yang juga berbeda.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi suatu kendala atau masalah karena pihak yang ingin menerapkan sistem akuntansi ini dapat mengevaluasi dan membandingkan fungsi-fungsi sistem akuntansi yang ada. Selama memiliki tugas dan fungsi yang sama, meskipun berbeda nama/istilah, sistem ini dapat dipakai atau diterapkan. Oleh karena itu, sistem ini disebut sebagai model sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan daerah.

Dalam menerapkan Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dalam pelaksanaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sistem akuntansi ini akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memadai sehingga sistem akuntansi ini berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah bahwa Pemerintah akan menjalankan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud salah satunya meliputi pemberian pedoman yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta

pengelolaan keuangan daerah, yang mana dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sistem akuntansi ditetapkan dengan dengan keputusan kepala daerah. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah. Perlakuan akuntansi yang dimaksud terdiri dari definisi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang, serta ekuitas dana.

Pada hakikatnya, orang belum dapat dikatakan memahami penyusunan laporan keuangan jika belum memahami sistem akuntansi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi, seperti laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen. Sistem akuntansi merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi pemda melalui pemrosesan data keuangan, mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan

mengenai perancangan informasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen dan pemakai lainnya. Perancangan sistem pengolahan informasi diintegritaskan untuk mengelola informasi akuntansi. Selain itu, perancangan berbagai unsur pengendalian internal dilekatkan dalam sistem pengolahan informasi tersebut.

Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Namun menjadi masalah adalah tidak semua aparat pemerintah daerah mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah.

B. PENELITIAN RELEVAN

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) menguji tentang Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang.

Firmansyah (2009) melakukan penelitian mengenai Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Barat.

Fajar (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena masih lemahnya pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) belum baik dalam penyusunan laporan keuangan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori

yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, Pengawasan keuangan daerah harus memadai di pemerintahan Kota Padang dan sistem akuntansi keuangan daerah haruslah baik.

Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang diselenggarakan oleh inspektorat daerah secara menyeluruh di lingkungan

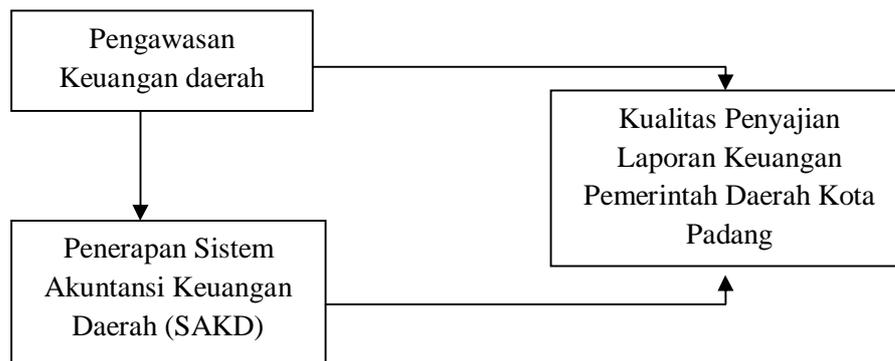
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan daerah Pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan.

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, juga perlu sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Karena sistem akuntansi keuangan daerah juga menentukan kualitas laporan keuangan. Maka oleh sebab itu, perlu adanya suatu sistem akuntansi dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dalam menerapkan Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dalam pelaksanaan akuntansi dalam pengelolaan APBD, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sistem akuntansi ini akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memadai sehingga sistem akuntansi ini berjalan sesuai dengan rencana. Maka oleh sebab itu, perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang

dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.
- H₂ : Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.
2. Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 49,5%

sedangkan sisanya 50,5% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Dari hasil penelitian ini berdasarkan data distribusi frekuensi skor, di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel kualitas laporan keuangan, indikator relevan dengan TCR kategori cukup. Menunjukkan bahwa informasi yang termuat di dalamnya seharusnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu dengan lebih baik.
3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
4. Indikator variabel pengawasan keuangan daerah masih belum relevan. Sebaiknya ditukar dan dicari indikatornya melalui sumber yang lebih relevan.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pengawasan keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada pengawasan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fajar, Adrianus. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. *Skripsi*. Universitas Putra Indonesia.
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Firmansyah, Irman. 2009. Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Jones, gregory. Jeanot, Blanchet. 2000. Assensing Quality of FInnancial Reporting, *Accounting Horizons*, Vol.14. Nomor 3.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan akuntansi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Modul Good Governance. 2006. “Akuntabilitas dan *Good Governance*”. Jakarta. Melalui (www.google.com) [29/03/2012]

Mundrajad, Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. Jakarta: Sinar Grafika

Soewardjono. 2005. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPF

Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers

Dokumen dan Literatur Penunjang

Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2002. *Tentang Tahapan-Tahapan Dalam Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah*

Departemen Keuangan. Tahun 2002. *Tentang Akuntansi Keuangan Daerah*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Cara-cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (www.google.com) [07/12/2010]

Peraturan Pemerintah, Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah. Melalui (www.google.com)

_____, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui (www.google.com)

_____, Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.
Melalui (www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui
(www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
TanggungJawab Keuangan Negara. Melalui (www.google.com)
[07/12/2010]

_____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui
(www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]

Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
Melalui (www.google.com) [19/10/2011]

[Www.padang.bpk.go.id](http://www.padang.bpk.go.id) [10/10/2011]